

**GERAKAN MAHASISWA MEI 1998 DALAM PROSES PERGANTIAN
ORDE BARU**

Oleh :

Firman Syahputra

Hasanuddin

Email : my_infinity@ymail.com

HP : 085278184858

ABSTRACT

The most striking thing is the days of the New Order that changes the relationship between students and the Armed Forces are controlled by President Suharto. Changing relationships because basically students never intended to be a political force like the party or the army, but always critical of the ruling government. Characteristics of the New Order government is considered to be behind the emergence of the student movement. In a book entitled The Politics and Ideology of Indonesian Students, Establishment and Consolidation of the New Order 1966-1974, by Francois Raillon published by LP3ES 1985, stated that the New Order government continues to receive a control of students in its development into a social movement that resistance in mid-1998. The purpose of this study was describe the Student Movement In May 1998 the New Order state Substitution Process. Theory (approach) is used as a tool of analysis in this study is the Student Movement Theory and the Theory of Social Change. While the methods used in this research is descriptive qualitative research which is intended to provide a systematic overview of the observed phenomena.

Based on this research, In looking at the process of reform in Indonesia in 1998 starting from the beginning to the results achieved, although according to the theory of social stability objective is to put a substance that important but still in need of social change. This is because the revolution is happening in the new order contributed to the change in the system of government in particular and society in general. Expected change some elements in the student movement is a comprehensive change in society. Their goal is all political and economic policy in the hands of the people in the real sense. However, the view that they should be recognized as a consolidation of the concept of expectations due to weak even among elements of the student movement together about it. Weak broad impact of the consolidation of the current student movement so that the student movement is no longer seen as something sacred to put pressure on the government which was considered deviant.

Keywords: Suharto, the New Order, Reform, Movement.

LATAR BELAKANG MASALAH

Adanya tiga kondisi lahirnya gerakan sosial seperti gerakan mahasiswa. Pertama, gerakan sosial dilahirkan oleh kondisi yang memberikan kesempatan bagi gerakan itu. Misalkan pemerintah yang moderat, memberikan kesempatan yang lebih besar bagi timbulnya gerakan sosial ketimbang pemerintah yang sangat otoriter. Kedua, gerakan sosial timbul karena meluasnya ketidakpuasan akan situasi yang ada. Misalnya terjadinya perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern, dapat mengakibatkan kesenjangan ekonomi yang makin lebar untuk sementara antara yang kaya dan yang miskin. Perubahan ini dapat pula menyebabkan krisis identitas dari lunturnya nilai-nilai sosial yang selama ini diagungkan.

Perubahan ini akan menimbulkan gejolak yang merugikan kemudian meluasnya gerakan sosial. Ketiga, gerakan sosial samata-mata masalah kemampuan kepemimpinan dari tokoh-tokoh penggerak yaitu yang mampu memberikan inspirasi, membuat jaringan, membangun organisasi yang menyebabkan sekelompok orang termotivasi terlibat dalam gerakan. Gerakan mahasiswa mengaktualisasi potensinya melalui sikap-sikap dan pernyataan yang bersifat himbauan moral. Mereka mendorong perubahan dengan menengahkan isu-isu moral sesuai sifatnya yang bersifat ilegal. Ciri khas gerakan mahasiswa ini adalah mengaktualisasi nilai-nilai ideal mereka karena ketidakpuasan terhadap lingkungan sekitarnya. Perhatian pemerintah yang sungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan sesuai dengan yang menjadi harapan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan barang dan jasa serta pelayanan yang optimal.

Permasalahan dalam negeri dan tidak adanya perbaikan di bidang ekonomi telah memicu Gerakan Mahasiswa pada tahun 1998. Gerakan mahasiswa terjadi di seluruh Indonesia terutama di Jakarta. Tulisan ini akan mendeskripsikan mengenai Gerakan Mahasiswa angkatan 1998 dengan menggunakan pendekatan prosesusual. Pendekatan ini akan melihat keragaman dan kesamaan antar kelompok Gerakan Mahasiswa, perubahan-perubahan karakternya dan strategi-strategi yang digunakan untuk melawan rejim penguasa serta kontinuitasnya. Proses dan peristiwa-peristiwa dari suatu fenomena sosial merupakan suatu rangkaian yang saling berkesinambungan. Pemahaman tentang kondisi-kondisi yang memungkinkan berlangsungnya relasi-relasi antara peristiwa satu dengan peristiwa lain merupakan bagian dari penjelasan yang harus dilakukan (Surjkomiharjo, 1989). Untuk itu, suatu kajian tentang proses harus mampu

menunjukkan hubungan yang berangkat dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain, dengan keterkaitan satu sama lain.

Terdapat empat faktor pendorong bagi peningkatan peranan mahasiswa dalam kehidupan politik. Pertama, sebagai kelompok masyarakat yang memperoleh pendidikan terbaik, mahasiswa mempunyai cakrawala pemikiran yang luas diantara masyarakat. Kedua, sebagai kelompok masyarakat yang paling lama menduduki bangku sekolah sampai universitas, sehingga mahasiswa telah mengalami proses sosial politik yang panjang diantara angkatan muda. Ketiga, kehidupan kampus membentuk gaya hidup yang unik dikalangan mahasiswa. Keempat, mahasiswa sebagai kelompok yang akan memasuki lapisan atas dari susunan kekuasaan, struktur perekonomian, dan prestise dalam masyarakat dengan sendirinya merupakan elite dalam kalangan angkatan muda (Sanit, 2007: 78-81).

Dimulai dengan turunnya mahasiswa Universitas Trisakti menuntut adanya perbaikan pemerintahan menjawab pertanyaan mengenai siapa yang sebenarnya harus bertanggung jawab atas peristiwa/Tragedi 12 Mei untuk dicari jawabannya karena sebenarnya kasus ini belum tuntas. Kondisi sosial, politik, ekonomi yang carut-marut pada bulan Mei 1998, hingga pada puncaknya adalah pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden Indonesia setelah menjabat selama 32 tahun pada hari Kamis, 21 Mei 1998. Hal inilah yang kemudian akan penulis coba jelaskan dalam tulisan ini dan seberapa besar peran mahasiswa dalam peristiwa Mei 1998 yang kemudian menjadi tonggak gerakan pembaharuan secara nasional (Reformasi).

LANDASAN TEORITIS

Gerakan Mahasiswa

Gerakan mahasiswa bukan dewa serba bisa. Karena keterbatasan itulah, mahasiswa perlu mengontekskan gerakannya dalam geliat zaman. Perlunya kritik dan otokritik terus menerus terhadap pilihan-pilihan yang diambil, membenarkan kata orang bijak, gerakan mahasiswa adalah anak pada zamannya. Artinya, setiap zaman memiliki masa dan penyesuaian dengan pola-pola gerakan yang juga berkembang. Jika pola penindasan lebih berkembang daripada pola gerak aktor perubahannya, apa yang mau diharapkan dari mahasiswa? (Adi Surya: Koran Media Indonesia. 2009: 8).

Seperti halnya gerakan sosial umumnya, gerakan mahasiswa senantiasa melibatkan pengorganisasian. Melalui organisasi inilah gerakan mahasiswa melakukan pula aksi massa, demonstrasi dan sejumlah aksi lainnya untuk mendorong kepentingannya. Dengan kata lain gerakan massa turun kejalan atau aksi pendudukan gedung-gedung publik merupakan salah satu jalan untuk mendorong tuntutan mereka. Dalam mewujudkan fungsi sebagai kaum intelektual itu mahasiswa memainkan peran sosial mulai dari pemikir, pemimpin dan pelaksana. Sebagai pemikir, mahasiswa mencoba menyusun dan menawarkan gagasan tentang arah dan perkembangan masyarakat. Peran kepemimpinan

dilakukan dengan aktivitas dalam mendorong dan menggerakkan masyarakat. Sedangkan keterlibatan mereka dalam aksi sosial, budaya dan politik disepanjang sejarah merupakan perwujudan dari peran pelaksana tersebut (Sanit, 1999:208).

Arbi Sanit mengemukakan, demonstrasi yang dilakukan mahasiswa fungsinya sebagai penganut tuntutan bukan sebagai kekuatan pendobrak penguasa. Strategi demonstrasi diluar kemampuan merupakan bagian dari upaya membangkitkan semangat massa mahasiswa. Berdasarkan bukunya Arbi Sanit yang berjudul Sistem Politik Indonesia ada dua tahap dalam reformasi politik. Pertama, tahap transisi yang merupakan proses peralihan dari proses krisis politik ke proses moral kehidupan politik. Ditahap transisi, pemicu proses reformasi akan mengawali aktualisasinya. Ada lima kemungkinan peristiwa politik yang berpotensi menjadi pemicu yang akan mengawali berlangsungnya proses reformasi politik yaitu kudeta, kesadaran penguasa, tekanan publik opini kepada penguasa, presiden meninggal dan kekuatan seseorang (people's power) yang aktif dan kuat. Tahap kedua, reformasi normal dimana reformasi dilakukan dalam rangka sistem politik yang ada. Reformasi normal ini dilakukan melalui reformasi suprastruktur dan infrastruktur. Kemudian Sanit menambahkan, reformasi politik mahasiswa terfokus kepada suksesi kepemimpinan, penegakan pemerintah yang kuat serta efektif sehingga produktif., penegakan pemerintahan yang bersih, penetapan kebijakan publik, yang adil dan tepat dan demokratisasi politik (Sanit. 1999: 129).

Hatta Albaink mengatakan bahwa "sejarah mencatat bahwa perubahan-perubahan besar berupa hancurnya kekuatan-kekuatan totaliter Soekarno dan Soeharto dilakukan oleh kekuatan-kekuatan mahasiswa sebagai penentu. Aktifnya mahasiswa dalam aktifitas politik yang diusung oleh partai politik ternyata hanya bersifat sementara. Terjadinya krisis ekonomi, sosial dan politik mendorong para mahasiswa untuk melakukan suatu gerakan politik yang diwujudkan dalam suatu gerakan mahasiswa. Terdapatnya perbedaan nilai antara mahasiswa yang mewakili golongan tua menjadi pendorong yang menjadikan gerakan mahasiswa sebagai kekuatan politik tersendiri yang terpisah dari kekuatan politik lainnya. Dalam usahanya menyelesaikan krisis yang terjadi, kekuatan politik mahasiswa yang terwujud dalam suatu gerakan mahasiswa, melakukan berbagai aksi sosial maupun politik yang tidak jarang agenda aksinya adalah bentuk protes terhadap pemerintah yang dianggap belum menyelesaikan krisis karena berbagai penyimpangan yang dilakukannya (Oetama, 2001:3).

Gerakan mahasiswa telah menjadi fenomena penting dalam perubahan politik yang terjadi di Indonesia tahun 1998. Setelah 32 tahun pemerintahan dibawah kendali Presiden Soeharto, krisis ekonomi melanda Indonesia yang diakibatkan pengendalian sumber daya keuangan yang tidak proporsional. Bantuan luar negeri yang semula membantu proses pembangunan menjadi sandaran utama dalam pembiayaan modernisasi. Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat berpendidikan dan sehari-harinya bergelut dengan pencarian kebenaran dalam kampus melihat kenyataan yang berbeda dalam kehidupan nasionalnya. Kegelisahan kalangan mahasiswa ini kemudian teraktualisasikan dalam aksi-aksi protes yang kemudian mendorong perubahan yang reformatif dalam sistem politik di Indonesia hingga saat ini.

Desain gerakan mahasiswa ini telah dikomunikasikan sedemikian jauh, antisipatif, heroik dan futuristik. Dengan pola aksi dan demonstrasi yang terjadi secara tali-temali dan hampir serentak di kampus-kampus yang ada di seluruh Indonesia, benturan-benturan dengan aparat keamanan tidak dapat terhindarkan. Korban baik yang meninggal dunia ataupun yang luka-luka menjadi tidak terhindarkan yang disertai adanya kerusakan sarana dan prasarana fisik (Suparno, 2012: 177).

Edward Shill mengkategorikan mahasiswa sebagai lapisan intelektual yang memiliki tanggung jawab sosial yang khas. Shill menyebutkan ada lima fungsi kaum intelektual yakni mencipta dan menyebarkan kebudayaan tinggi, menyediakan bagan-bagan nasional dan antar bangsa, membina keberdayaan dan bersama, mempengaruhi perubahan sosial dan memainkan peran politik (Setiawan, 2007). Arbi Sanit memandang, mahasiswa cenderung terlibat dalam tiga fungsi terakhir. Sementara itu Samuel Huntington menyebutkan bahwa kaum intelektual di perkotaan merupakan bagian yang mendorong perubahan politik yang disebut reformasi.

Menurut Arbi Sanit (1984:90) ada empat faktor pendorong bagi peningkatan peranan mahasiswa dalam kehidupan politik. Pertama, sebagai kelompok masyarakat yang memperoleh pendidikan terbaik, mahasiswa mempunyai horison yang luas diantara masyarakat. Kedua, sebagai kelompok masyarakat yang paling lama menduduki bangku sekolah, sampai di universitas mahasiswa telah mengalami proses sosialisasi politik yang terpanjang diantara angkatan muda. Ketiga, kehidupan kampus membentuk gaya hidup yang unik di kalangan mahasiswa. Di Universitas, mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah, suku, bahasa dan agama terjalin dalam kegiatan kampus sehari-hari. Keempat, mahasiswa sebagai kelompok yang akan memasuki lapisan atas dari susunan kekuasaan, struktur perekonomian dan prestise dalam masyarakat dengan sendirinya merupakan elit di dalam kalangan angkatan muda.

Di Harian Kompas, Denny JA (1998) juga menyatakan adanya tiga kondisi lahirnya gerakan sosial seperti gerakan mahasiswa. Pertama, gerakan sosial dilahirkan oleh kondisi yang memberikan kesempatan bagi gerakan itu. Pemerintahan yang moderat, misalnya memberikan kesempatan yang lebih besar bagi timbulnya gerakan sosial ketimbang pemerintahan yang sangat otoriter. Kedua, gerakan sosial timbul karena meluasnya ketidakpuasan atas situasi yang ada. Perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern, misalnya dapat mengakibatkan kesenjangan ekonomi yang makin lebar untuk sementara antara yang kaya dan yang miskin. Perubahan ini dapat pula menyebabkan krisis identitas dan luntarnya nilai-nilai sosial yang selama ini diagungkan. Perubahan ini akan menimbulkan gejolak yang dirugikan dan kemudian meluasnya gerakan sosial. Ketiga, gerakan sosial semata-masa masalah kemampuan kepemimpinan dari tokoh penggerak. Adalah sang tokoh penggerak yang mampu memberikan inspirasi, membuat jaringan, membangun organisasi yang menyebabkan sekelompok orang termotivasi terlibat dalam gerakan. Gerakan mahasiswa mengaktualisasikan potensinya melalui sikap-sikap dan pernyataan yang bersifat imbauan moral. Mereka mendorong perubahan dengan mengetengahkan isu-isu

moral sesuai sifatnya yang bersifat ideal. Ciri khas gerakan mahasiswa ini adalah mengaktualisasikan nilai-nilai ideal mereka karena ketidakpuasan terhadap lingkungan sekitarnya.

Gerakan moral ini diakui pula oleh Arief Budiman yang menilai sebenarnya sikap moral mahasiswa lahir dari karakteristiknya mereka sendiri. Mahasiswa, tulis Arief Budiman (Budiman:103), sering menekankan peranannya sebagai “kekuatan moral” dan bukannya “kekuatan politik”. Aksi protes yang dilancarkan mahasiswa berupa demonstrasi di jalan dinilai juga sebagai sebuah kekuatan moral karena mahasiswa bertindak tidak seperti organisasi sosial politik yang memiliki kepentingan praktis. Arief Budiman juga menambahkan, konsep gerakan moral bagi gerakan mahasiswa pada dasarnya adalah sebuah konsep yang menganggap gerakan mahasiswa hanyalah merupakan kekuatan pendobrak, ketika terjadi kemacetan dalam sistem politik. Setelah pendobrakan dilakukan maka adalah tugas kekuatan-kekuatan politik yang ada dalam hal ini partai-partai atau organisasi politik yang lebih mapan yang melakukan pembenahan.

Sependapat dengan Arief Budiman, Arbi Sanit menyatakan komitmen mahasiswa yang masih murni terhadap moral berdasarkan pergulatan keseharian mereka dalam mencari dan menemukan kebenaran lewat ilmu pengetahuan yang digeluti adalah sadar politik mahasiswa. (Budiman: 2005:103) Karena itu politik mahasiswa digolongkan sebagai kekuatan moral. Kemurnian sikap dan tingkah laku mahasiswa menyebabkan mereka dikategorikan sebagai kekuatan moral, yang dengan sendirinya memerankan politik moral.

Namun seperti halnya gerakan sosial umumnya senantiasa melibatkan pengorganisasian. Melalui organisasi inilah gerakan mahasiswa melakukan pula aksi massa, demonstrasi dan sejumlah aksi lainnya untuk mendorong kepentingannya. Dengan kata lain gerakan massa turun ke jalan atau aksi pendudukan gedung-gedung publik merupakan salah satu jalan untuk mendorong tuntutan mereka. Dalam mewujudkan fungsi sebagai kaum intelektual itu mahasiswa memainkan peran sosial mulai dari pemikir, pemimpin dan pelaksana. Sebagai pemikir mahasiswa mencoba menyusun dan menawarkan gagasan tentang arah dan pengembangan masyarakat. Peran kepemimpinan dilakukan dengan aktivitas dalam mendorong dan menggerakkan masyarakat. Sedangkan keterlibatan mereka dalam aksi sosial, budaya dan politik di sepanjang sejarah merupakan perwujudan dari peran pelaksanaan tersebut.

Perubahan Sosial dan Gerakan Mahasiswa

Perubahan Sosial adalah perubahan dalam hubungan interaksi antar orang, organisasi atau komunitas, ia dapat menyangkut struktur sosial atau pola nilai dan norma serta peran. Dengan demikian istilah yang mestinya adalah perubahan sosial-kebudayaan karena memang antara manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dengan kebudayaan itu sendiri. Kenyataan mengenai perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat dianalisa dari berbagai segi diantaranya: ke arah mana perubahan masyarakat itu bergerak (direction of change), yang jelas adalah perubahan itu bergerak meninggalkan faktor yang diubah (Suharsih, 2007: 1).

Wilbert Maore mendefinisikan perubahan sosial sebagai pola-pola perilaku struktur sosial dan yang dimaksud dengan struktur sosial adalah pola-pola perilaku sosial. Dengan demikian dapat diartikan bahwa perubahan sosial dalam suatu kejadian untuk melihat dan mempelajari tingkah laku masyarakat dalam kaitannya dengan perubahan (Suharsih, 2007: 2).

William F. Ogburn berpendapat ruang lingkup perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan, baik yang material maupun yang bukan material. Unsur-unsur material itu berpengaruh besar atas bukan material. Kingsley Davis berpendapat bahwa perubahan sosial ialah perubahan dalam struktur dan fungsi masyarakat. Misalnya, dengan timbulnya organisasi buruh dalam struktur dan fungsi kapitalis, terjadi perubahan-perubahan hubungan antara buruh dengan majikan, selanjutnya perubahan-perubahan organisasi ekonomi dan politik (Suharsih, 2007: 1).

Mac Iver mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan hubungan-hubungan sosial atau perubahan keseimbangan hubungan sosial. Gillin memandang perubahan sosial sebagai penyimpangan cara hidup yang telah diterima, disebabkan baik oleh perubahan kondisi geografi, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi ataupun karena terjadinya digusi atau penemuan baru dalam masyarakat. Selanjutnya Samuel Koeing mengartikan perubahan sosial sebagai modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia, disebabkan oleh perkara-perkara intern atau ekstern (Iver, 2008: 3). Akhirnya dikutip definisi Selo Soemardjan bahwa Selo Soemardjan adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat (Suharsih, 2007: 3).

Pada akhirnya perubahan sosial dapat terjadi karena terjadinya karena timbulnya perubahan pada unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat, seperti yang terjadi pada saat tahun 1998 di Indonesia. Perubahan pada unsur ekonomi memaksa Indonesia kemudian mengalami perubahan unsur politik dan perubahan pada semua aspek-aspek kehidupan sosial lainnya dalam masyarakat karena masyarakat itu bersifat dinamik. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia dari tahun 1997 bukanlah faktor utama penyebab perubahan, karena apabila tidak ada paksaan dari masyarakat dan mahasiswa yang melakukan demonstrasi besar-besaran di seluruh pelosok Nusantara, mungkin perubahan di segala bidang tidak akan terjadi dan dimulai pada tahun 1998.

Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis. Metode ini lazim digunakan dalam penelitian sejarah. Melalui metode ini dilakukan suatu proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Moeloeng, 2000: 32). Adapun langkah-langkah penelitian ini mengacu pada proses metodologi penelitian dalam penelitian sejarah yang mengandung empat langkah penting:

- a. Heuristik, merupakan upaya mencari dan mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Dalam proses mencari

sumber-sumber ini, penulis mendatangi berbagai perpustakaan. Selain itu penulis pun mencari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Untuk menemukan sumber itu. Sumber sejarah biasanya dibagi menjadi sumber sejarah primer dan sumber sejarah sekunder. Sumber sejarah primer yang dapat digunakan untuk mengkaji permasalahan yang ada dalam skripsi ini adalah beberapa buku yang bertemakan mengenai runtuhnya rezim Orde Baru yang biasanya diterbitkan setelah 1998 seperti buku Politik Huru Hara Mei 1998 karya Fadly Zon, yang menerangkan bagaimana peristiwa Mei 1998 terjadi.

- b. Kritik, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber sejarah, baik isi maupun bentuknya (internal dan eksternal). Kritik internal dilakukan oleh penulis untuk melihat layak tidaknya isi dari sumber-sumber yang telah diperoleh tersebut untuk selanjutnya dijadikan bahan penelitian dan penulisan. Kritik eksternal dilakukan oleh penulis untuk melihat bentuk dari sumber tersebut. Dalam tahap ini, penulis berusaha melakukan penelitian terhadap sumber-sumber yang berkaitan dengan topik penelitian ini.
- c. Interpretasi, dalam hal ini penulis memberikan penafsiran terhadap sumber-sumber yang telah dikumpulkan selama penelitian berlangsung. Kegiatan penafsiran ini dilakukan dengan jalan menafsirkan fakta dan data dengan konsep-konsep dan teori-teori yang telah diteliti oleh penulis sebelumnya.

Penulis juga melakukan pemberian makna terhadap fakta dan data yang kemudian disusun, ditafsirkan, dan dihubungkan satu sama lain. Fakta dan data yang telah diseleksi dan ditafsirkan selanjutnya dijadikan pokok pikiran sebagai kerangka dasar penyusunan proposal ini. Misalnya, dalam kegiatan ini, penulis memberi penekanan penafsiran terhadap data dan fakta yang diperoleh dari sumber-sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan Peristiwa Mei 1998 secara mendalam.

- d. Historiografi, merupakan langkah terakhir dalam penulisan ini. Dalam hal ini penulis menyajikan hasil temuannya pada tiga tahap yang dilakukan sebelumnya dengan cara menyusunnya dalam suatu tulisan yang jelas dalam bahasa yang sederhana dan menggunakan tata bahasa penulisan yang baik dan benar.

PEMBAHASAN

Keadaan Ekonomi dan Politik Menjelang Jatuhnya Soeharto

Secara keseluruhan pembicaraan-pembicaraan yang menyangkut politik kepemimpinan nasional, tidak dapat dilepaskan dari konteks pribadi soeharto. Mekanisme pencalonan kepemimpinan nasional selain Soeharto. Kondisi ini telah diperkirakan akan menghasilkan sebuah transisi kepemimpinan yang akan menimbulkan krisis.

Disadari atau tidak, siapapun yang akan menjabat sebagai presiden untuk masa bakti 1998-2003 sebenarnya telah terbayang-bayang, beban dan tanggung jawab yang akan dipikul sangat berat. Masalah-masalah itu berkembang secara simultan seperti krisis ekonomi, kerusuhan massa, dan demonstrasi mahasiswa yang melibatkan banyak elemen masyarakat.

Melalui krisis ekonomi yang gejalanya yang mulai terlihat pada bulan Mei 1997, banyak pihak mulai terbuka menunjuk pada praktik-praktik monopoli, proteksionisme, kolusi, dan nepotisme sebagai akar penyebabnya. Struktur perekonomian yang rapuh dan tidak kokoh serta tidak mencerminkan demokratisasi ekonomi, intervensi kebijakan yang salah arah, regulasi yang tidak tepat, monopoli yang bercampur subsidi, serta industri yang tidak efisien dan merugi.

Gerakan Mahasiswa dalam Proses Pergantian Orde Baru

Krisis ekonomi dan moneter tahun 1997 yang berkembang menjadi krisis multi dimensional tahun 1998 telah memberikan energi positif bangkitnya reformasi di Indonesia untuk merekonstruksi kehidupan bernegara yang demokratis dan bermartabat. Satu dekade reformasi telah berlangsung, namun masih berada dalam tahapan transisi demokrasi prosedural elektoral dan belum terwujud demokrasi substansial. Dalam tahapan ini masih ditengarai bahwa agenda signifikan berlangsungnya pemilihan umum (Pemilu) secara regular sebagai arena kompetisi partai politik merebut mandat rakyat untuk mengakumulasi kekuasaan dalam jabatan publik baik di lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif.

Dari perspektif sosiologi-politik, transisi demokrasi yang ditengarai oleh dominannya peran institusi partai politik sebagai mesin demokrasi, dalam praktiknya akan menimbulkan berbagai distorsi yang berimplikasi terhadap proses demokratisasi. Secara akademik fenomena tersebut menarik untuk dikaji implikasinya terhadap pembangunan sistem demokrasi.

Pesan tuntutan yang mewarnai demonstrasi mahasiswa tidak dapat dilepaskan dari bentuk komunikasi yang dinyatakan oleh sejumlah kalangan, baik organisasi sosial kemasyarakatan, partai politik sampai lembaga keuangan internasional menyangkut reformasi ekonomi dan reformasi politik.

Hal yang menarik adalah tampak nya bukan kebetulan bila agenda-agenda kepentingan itu dan menjadi isu-isu sensitif memiliki jalinan dengan tuntutan yang dinyatakan dalam aksi, unjuk rasa maupun demonstrasi mahasiswa terbatas.topiknya masih terbatas pada persoalan dan implikasi penerapan normalisasi kehidupan kampus/Badan Koordinasi Kampus (NKK/BKK).

Kemudian muncul penilaian bahwa kampus yang secara tradisi memiliki otonomi, namun karena dibawah sistem kebijakan Orde Baru, tradisi otonom ini telah menjadi “pabrik” yang berfungsi menstransfer ilmu pengetahuan yang menghasilkan tenaga-tenaga profesional yang tidak peduli dengan persoalan-persoalan politik. Hariman Siregar menganalogikannya seperti pompa bensin yang

melayani banyak keperluan, tetapi tidak dapat diharapkan lagi menjadi agen pengubah sosial (Suparno, 2012:141).

Sedangkan Eros Djarot mencurigai, ketidakpekaan mahasiswa terhadap persoalan-persoalan politik, karena kampus telah dikuasai oleh orang-orang luar yang diwujudkan dalam personifikasi rektor. Menurutnya, yang lebih serius dari itu adalah ada ketidakmampuan berpikir dan mentalitas tidak merdeka menjadi mahasiswa itui tidak pekaterhadap persoalan-persoalan politik yang terjadi(Suparno, 2012:141).

Pada batas itu, kebijakan orde baru dijadikan sasaran (*scapegoat*) atas kondisi objektif yang mematikan otonomi kampus. Kebijakan ini ditempuh, dikarenakan pemerintah Orde Baru dicurigai khawatir dan takut terhadap mahasiswa. Setidaknya ada yang melihat, langkah ini merupakan cermin bahwa sebagai kekuasaan, Orde Baru memiliki ingatan terhadap legitimasi yang juga bersumber dari gerakan mahasiswa.

Kesadaran bahwa kekuatan mahasiswa sangat besar dan dapat menjatuhkan atau pun membawa kekuasaan itu hancur, maka ada upaya agar kehidupan kampus mesti diletakkan pada fungsi sebagai transfer ilmu pengetahuan yang menghasilkan tenaga tenaga yang profesional bagi pembangunan. Dengan asumsi itu kampus sedapat mungkin, disterilkan dari persoalan persoalan politik praktis.

Munculnya Era Reformasi

Era reformasi di Indonesia dimulai pada pertengahan tahun 1998, tepatnya pada saat presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998. Krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin besarnya ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan Soeharto saat itu menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organ aksi mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia. B. J. Habibie yang menjadi Wakil Presiden dan sebelumnya menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi, menggantikannya sebagai Presiden baru. Jatuhnya pilihan kepada B. J. Habibie merupakan suatu hal yang kontroversial. Habibie sesungguhnya mewarisi suatu pemerintahan yang mengalami kerusakan total serta bersifat multidimensioal baik dalam segi moniter, ekonomi, sosila, politik, dan juga mental (Muridan, 1999: 129). Proyek kebanggaan Habibie, Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) masalnya, sering menjadi sasaran kritik karena diduga telah menyalahgunakan anggaran negara. Pemerinthan Soeharto semakin disorot setelah tragedi Triaakti pada tanggal 12 Mei 1998 yang kemudian memicu kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya. Gerakan mahasiswaupun meluas hampir diseluruh Indonesia. Dibawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Pada tanggal 21 Mei 1998 tepatnya pukul 09.00 WIB, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dan kemudian mengucapkan terimakasih serta mohon maaf kepada seluruh rakyat. Masa reformasi baru terlaksana ketika Indonesia setelah

pemerintahan Soeharto. Dimana B. J. Habibie sebagai presiden Indonesia yang ketiga, memperkenalkan suatu reformasi yang menjanjikan suatu masyarakat yang lebih demokratis, adil, dan terbuka. Kemudian beberapa langkah perubahan diambil oleh Habibie, seperti liberalisme parpol, pemberian kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan pencabutan UU Subversi. Ketika Habibie menggantikan mentornya Soeharto sebagai presiden pada tanggal 21 Mei 1998, ada lima isu terbesar yang harus dihadapinya.

Dampak Setelah Runtuhnya Rezim Orde Baru

Setelah jatuhnya rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, banyak mengalami perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial. Hal ini dapat dilihat dari munculnya era reformasi yang mengalami perubahan-perubahan seperti berikut ini:

Bidang Ekonomi

Dalam perdebatan-perdebatan mengenai ekonomi, sering diperdebatkan apakah ekonomi menjadi prasyarat keamanan ataukah sebaliknya keamanan menjadi prasyarat hidupnya ekonomi. Apabila ekonomi rusak dan keluarga-keluarga dalam masyarakat tidak mungkin memenuhi kebutuhannya, pelanggaran-pelanggaran hukum amat sukar dicegah. Tetapi, kalau keadaan umum tidak aman kegiatan-kegiatan ekonomi pasti terganggu, bahkan mungkin buat sementara terhenti. Keamanan umum di Indonesia dalam satu tahun sesudah Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden mengalami banyak gangguan, sedangkan ekonomi umum belum mampu bangkit kembali dari pukulan berat oleh krisis moneter (Robert, 2004:90).

Nilai rupiah terhadap dollar AS dalam beberapa bulan sesudah pergantian tahun 1998 sampai 1999 relatif stabil tetapi pada tingkat yang tinggi antara Rp. 7.000 dan Rp. 8.000 sehingga belum dapat membantu ibi-ibu rumah tangga dari kelas rendah yang penghasilan kerjanya dalam rupiah belum cukup untuk mengejar harga sembako yang tetap tinggi. Karena keadaan ekonomi yang demikian, jumlah anak jalanan dan preman tidak berkurang, tetapi malah bertambah. Para petani pangan juga banyak yang mengeluh karena tingginya harga pupuk dan karena saingan harga beras dari luar negeri yang dapat masuk ke Indonesia dengan bebas pajak atau dengan pajak yang rendah.

Bidang Politik

Suasana politik sesudah berhentinya Presiden Soeharto penuh dengan kejadian-kejadian yang menimbulkan frustrasi dikalangan Pemerintah, ABRI, partai-partai politik dan masyarakat umum. Di antara kejadian-kejadian itu dapat disebut beberapa yang membawakan disintegrasi politik berkepanjangan, misalnya naiknya Habibie menjadi Presiden menggantikan Soeharto, pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan, timbulnya partai-partai politik baru, tawaran kepada rakyat Timor-Timur untuk mendapatkan otonomi luas atau kemerdekaan, gerakan di Irian Jaya dan Aceh untuk mendirikan negara merdeka

baru lepas dari Republik Indonesia; Rencana Pemilu 1999 dan pencalonan Presiden.

Disamping itu, hampir setiap hari orang Jakarta dan kota besar lainnya dapat membaca di surat kabar, majalah atau tabloid tentang politik pemerintahan Soeharto yang merugikan negara dan rakyat karena bertentangan dengan sistem demokrasi. Yang amat menyakitkan hati masyarakat umum adalah kekayaan senilai berpuh milyar dollar Amerika yang menurut berita-berita pers dikumpulkan oleh Soeharto dan oleh anak-anaknya di bawah lindungan Soeharto sebagai kepala negara sampai tidak akan habis dalam tujuh turunan. Padahal, rakyat dilanda krisis moneter dan krisis ekonomi yang menaikkan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan dari 25.000.000 menjadi 100.000.000 dalam waktu kurang dari satu tahun 1997-1998. seruan "Usut Kekayaan Soeharto" dan "Adili Soeharto" dimuat berkali-kali di dalam media cetak dan didengar dalam demonstrasi-demonstrasi para mahasiswa. Suara rakyat itu menggema di Sidang Istimewa MPR tanggal 10-13 November 1998 sehingga diterbitkan suatu ketetapan MPR yang memerintahkan kepada Presiden untuk mengusut tuduhan-tuduhan itu sampai tuntas. Namun, sampai lebih dari setengah tahun kemudian tidak tampak gerakan yang serius dari pemerintah atau Jaksa Agung yang serius untuk memenuhi ketetapan itu.

Bidang Sosial

Sejak Soeharto menyatakan dirinya berhenti dari jabatan Presiden pada tanggal 21 Mei 1998 sampai satu tahun kemudian keadaan sosial di Indonesia selalu diganggu oleh berbagai peristiwa yang meresahkan masyarakat banyak. Jumlah kemiskinan yang setahun lalu mencuat sampai 100 juta belum menunjukkan gejala menurun. Jumlah penganggur sebagai korban PHK tidak kurang dari tujuh juta, dengan kebanyakan di antara mereka bermukim di kota-kota besar.

Banyaknya jumlah penduduk miskin dan korban PHK, banyak keluarga terpaksa mengurangi makan sehari-hari atau memilih makanan yang berkualitas gizi rendah, juga buat anak-anak di bawah umur sepuluh tahun yang sedang sangat membutuhkan masukan gizi yang cukup sebagai landasan kesehatan badan mereka. Dikhawatirkan, kalau kekurangan gizi berlangsung lebih lama generasi anak-anak dikemudian hari akan menjadi generasi anak-anak yang lemah. Kekurangan gizi yang berkepanjangan tidak hanya memiliki pengaruh negatif terhadap perkembangan tubuh anak, akan tetapi juga intelegensi atau daya pikir mereka. Selain itu, gejala sosial yang menarik perhatian adalah di bidang keamanan dan ketertiban umum. Tahun 1999, kepolisian RI secara organisatoris dan operasional dipisahkan dari angkatan-angkatan bersenjata. Istilah ABRI tidak lagi berlaku dan diganti dengan TNI yang meliputi angkatan darat, laut dan udara. Di samping itu, kepolisian RI berdiri sendiri meskipun secara administratif tetap di bawah pimpinan Menteri Pertahanan dan Keamanan.

Kesimpulan

Dalam melihat proses reformasi di Indonesia pada tahun 1998 mulai dari awal hingga hasil yang dicapai, Walaupun menurut teori tujuannya adalah meletakkan kestabilan sosial menjadi substansi yang penting namun tetap membutuhkan perubahan sosial. Hal ini dikarenakan revolusi yang terjadi pada masa orde baru memberi sumbangsih perubahan terhadap sistem pemerintahan secara khusus dan masyarakat secara umum.

Perubahan yang diharapkan beberapa elemen dalam gerakan mahasiswa adalah sebuah perubahan yang menyeluruh di masyarakat. Tujuan mereka adalah semua kebijakan politik dan ekonomi berada di tangan rakyat dalam arti sesungguhnya. Akan tetapi, pandangan itu harus mereka akui sebagai harapan karena lemahnya konsolidasi konsep bahkan diantara elemen gerakan mahasiswa bersama tentang hal tersebut. Lemahnya konsolidasi tersebut berdampak luas terhadap pergerakan mahasiswa saat ini sehingga pergerakan mahasiswa tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang sakral dalam melakukan tekanan terhadap pemerintah yang dinilai menyimpang.